

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka setia, Surakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asep Muslim, 2007, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Perca, Jakarta
- David Beetham & Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, 2016, „*Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*“
- Eko, Sutoro & T. Kashaah 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta
- Huda N, 2014, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum tata negara pilar-pilar demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana, Jakarta.
- Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. RINEKA CIPTA. Yogyakarta
- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, Yogyakarta
- Miriam Budiarmo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maria Farida Indrati Soeprato, 2010, *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta
- Moch, Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara, Malang
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Suhartono dkk, 2000, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Thalib, D., & Hamidi, J. Ni'matul Huda, 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Eza Aulia, "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Periode Sasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Di Aceh," *Jurnal Ius Civile* 4, no. 1 Tahun 2020

Kadek Cahya Susila Wibawa, "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 Tahun 2019

Laode Maulidin, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perseleisihan Hasil Pemilu yang Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1, 2011

Martosoewigno S.S. "Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 3, No. 6, Tahun 1996

Maslul, S. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". *Literasi Hukum*, 6(2), (2022)

Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in The Context of Regional Autonomy)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2016

Pambudhi, H. D. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala

Desa Berdasarkan Ajaran Konstitualisme.” Wijaya Putra Law Review, 2(1), (2023)

Patta, Abdul Kadir, "Masalah dan Prospek Demokrasi." Jurnal Academica Fisip UNTAD, Vol 1, No 1, Tahun 2009

Sadhu Bagas Suratno, „Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik“,Jurnal E-Journal Lentera Hukum,Vol.4 No.3 Tahun 2021

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

E. Website

<https://tirto.id/hasil-demo-masa-jabatan-kepala-desa-2023-dan-berapa-gajinya-gBgc>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49059/t/Tok!%20DPR%20Resmi%20Sahkan%20RUU%20Desa%20Menjadi%20UU>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-](https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/)

[26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/](https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--uu-desa-memuat-26-poin-perubahan-lt660510bb751e0/)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>

